

**JAMINAN SOSIAL VERSI DESA MELALUI INOVASI TIGA KARTU  
(Studi Konsep, Implementasi, dan Dampak Jaminan Sosial Desa  
Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Oleh:**

**Riyan Agus Prasetyo  
NIM 12230070**

**Pembimbing**

**Dr. Pajar Hatma Indra Jaya S. Sos., M. Si.  
NIP 19810428 200312 1 003**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/254/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul

**JAMINAN SOSIAL VERSI DESA MELALUI INOVASI TIGA KARTU  
(Studi Konsep, Implementasi, dan Dampak Jaminan Sosial Desa  
Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Riyan Agus Prasetyo  
Nomor Induk Mahasiswa : 12230070  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

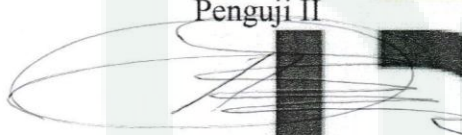
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJIAN AKHIR MUNAQOSAH**

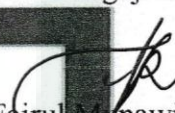
Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. Pajar Hama Indra Jaya, S. Sos., M. Si.  
NIP. 198104282003121003

Penguji II

  
Drs. Moh. Abu Subud, M. Pd.  
NIP. 196104101990011001

Penguji III

  
M. Fajrul Munawir, M. Ag.  
NIP. 197004091998031002


Yogyakarta, 30 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DEKAN



  
Dr. Nurjannah, M. Si.  
NIP. 196003101987032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
JL. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 515856,  
Fax. (0274) 552230 [www.uin-suka.ac.id](http://www.uin-suka.ac.id) email [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id)

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Riyan Agus Prasetyo  
NIM : 12230070  
Judul Skripsi : **JAMINAN SOSIAL VERSI DESA MELALUI INOVASI TIGA KARTU (Studi Konsep, Implementasi, dan Dampak Jaminan Sosial Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)**

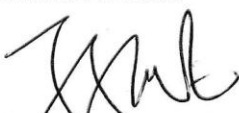
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 21 Maret 2016,

Mengetahui:

Ketua Jurusan

  
Dr. Pajar Hatma Indra Jaya.  
NIP 198.10428.200312.1.003

Dosen Pembimbing,

  
Dr. Pajar Hatma Indra Jaya.  
NIP 198.10428.200312.1.003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyan Agus Prasetyo  
NIM : 12230070  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **JAMINAN SOSIAL VERSI DESA MELALUI INOVASI TIGA KARTU (Studi Konsep, Implementasi, dan Dampak Jaminan Sosial Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Maret 2016

Yang menyatakan,



Riyan Agus Prasetyo  
12230070



## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Alhamdulillah. Proses yang panjang sudah saya lewati di kota pelajar ini, kota perjuangan, kota yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman hidup yang tak hanya*

*saya peroleh dari bangku kuliah, Yogyakarta.*

*Tak mudah untuk melewati semua ini, butuh mental baja, doa yang tak pernah padam,*

*dukungan serta doa orang tua yang selalu mengalir untuk setiap kaki ini melangkah.*

*Ibu, Bapak, anakmu sekarang sudah sampai pada titik perjuangan dalam menempuh Strata 1, saya yakin ini semua tidak akan terwujud, tanpa doa yang selalu engkau panjatkan*

*kepada Sang Ilahi untuk anakmu ini.*

*Begitu besar jasa yang telah kalian berikan,*

*hingga ku tak tahu lagi tentang hal apa yang paling pantas untuk membalas jasa itu,*

*yang bisa saya lakukan hanya mencoba untuk selalu memberikan*

*hal yang terbaik buat kalian.*

*Saya selalu berdoa di setiap sujudku, semoga Allah selalu melindungi*

*Bapak dan Ibu, dan suatu hari nanti insyaallah*

*saya bisa membuat kalian bangga dengan kesuksesan yang saya raih.*

*Amin.*

***“Hanya doa dan ridho kalian yang selalu ku harapkan, untuk menyinari setiap langkahku di kehidupan yang fana ini”***

*Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:*

*Bapak dan Ibu ku tercinta, Bapak Suparlan dan Ibu Kasmirah,*

*dan Almamater ku tercinta,*

*Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam*

*Fakultas Dakwah dan Komunikasi*

*UIN Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta.*

## MOTTO

من سار على الدرب وصل، من جد وجد، من صبر ظفر

*“Barang siapa yang berjalan pada jalannya pasti akan sampai, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, dan barang siapa yang bersabar pasti akan menang”.<sup>1</sup>*

“Hidup adalah proses perjuangan yang harus dijalani dengan ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Tiada lain tujuan hidup ini kecuali hanya untuk mengabdikan dan menyebarkan kebermanfaatannya bagi keluarga, bangsa dan agama”. (Penulis)

---

<sup>1</sup> Al-Markaz Al-Lughoh wa As-Saqofat wa Al-Adyan, Al-Jami'ah Sunan Kalijaga Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Yogyakarta, *Al-Jami'ah Li Ta'lim Al-Lughoh Al-'Arobiyah*, (Yogyakarta), hlm. 39.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الرب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنام، سيدنا محمد و على آله وصحبه، أما بعد.

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga dengan rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa selalu tucurahkan kehariban baginda Nabi Muhammad SAW, nabi yang membawa misi besar agama, yakni *Dinnul Islam*, agama yang *rahmatan lil'alamin*. Semoga dengan bacaan shalawat kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di *yaumul kiyamah*.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, tentunya banyak kendala-kendala yang penulis hadapi, akan tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Machasin, MA., selaku Pgs Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pejabatnya.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M. Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajaran pejabatnya.
3. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya S. Sos., M. Si., selaku Ketua Jurusan PMI (Pengembangan Masyarakat Islam), sekaligus pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang secara ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan kritikan, masukan, dan saran demi membangun keilmuan penulis, sehingga penyusunan

skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga semua kebaikan bapak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan keluarga bapak diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin.

4. Bapak Suyanto, S. Sos., M. Si, selaku Sekretaris Jurusan PMI, dan Dosen Pembimbing Lapangan PPM (Praktek Pengembangan Masyarakat Islam), yang selalu memberikan arahan dan nasehat kepada penulis. Semoga bapak dan sekeluarga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin.
5. Bapak Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang selalu memberi bimbingan dan arahnya selama penulis menjalani proses studi Sarjana Strata 1 di Jurusan PMI. Semoga bapak dan sekeluarga selalu dalam lindungannya. Amin.
6. Seluruh Dosen Jurusan PMI pada khususnya, dan seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan ketulusan yang telah mereka berikan.
7. Seluruh staff Tata Usaha, baik yang ada di Jurusan PMI, maupun yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah membantu penulis dalam kelancaran mengurus administrasi selama menempuh pendidikan Strata 1. Sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu.



8. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparlan dan Ibu Kasmirah, yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan apapun yang terbaik, terlebih kasih sayang dan cinta yang tak pernah padam yang penulis dapatkan. Atas dukungan Bapak dan Ibu, penulis termotivasi untuk selalu bersungguh-sungguh dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis, khususnya kakak kandung saya Teguh Mulyono, dan Istrinya Azka Rosyita, Bu lek Yati, Bu Lek Zah, Pak Lek Kahar, Pak Lek Wartono, sepupu penulis Devi, Nur Avida, M Ridho Aji. Dan semua saudara-saudara saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu-satu, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
10. Sahabat-sahabat perjuangan penulis di organisasi HMJ PMI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam), di PMII Rayon Syahadat Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), di LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Rhetor, terima kasih sahabat atas proses yang selama ini kita lalui bersama.
11. Sahabat-sahabat penulis, Hendri Irawan, Rudi, Fifit, Irfan, Kendri, Aji, Sandi, Abbel, Thoyib, Andi, Dikki, Duwik, Fitriyani, Santi, Fitri, Erna, Jannah, Nana, Nisa dan Nita, semoga suatu saat nanti kita dipertemukan kembali dengan keadaan sukses. Amin
12. Teman-teman seperjuangan penulis di Jurusan PMI angkatan 2012, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas

kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama ini, amanatnya sebagai ketua angkatan.

13. Kepada keluarga baru ku, teman-teman PPM (Praktek Pengembangan Masyarakat) di Dusun Barongan, Fadil, Asna, Atin, Jannah, Farida, Ihda, dan Nila. Banyak pelajaran yang kita dapatkan, semoga pengabdian kita bermanfaat bagi masyarakat Dusun Barongan.
14. Teman-teman KKN kelompok 73 angkatan 86 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga pengalaman dan ilmu yang kita dapatkan dan kita berikan selama mengabdikan di masyarakat bisa bermanfaat.
15. Kepada Bapak Lurah Desa Panggungharjo Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt., Bapak Sunarno, S. Ag., Bapak Jamilludin, Mas Aji, Mas Riki, dan seluruh staff desa yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu-satu, yang telah memberikan waktunya dan tak bosan-bosannya memberikan informasi data terkait penulisan skripsi ini. Semoga Desa Panggungharjo tetap konsisten menjadi desa percontohan di Indonesia.
16. Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Allah Membalas kebaikan semua. Amin.

Akhir kata penulis berdo'a, mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang merupakan

salah satu tri dharma perguruan tinggi. Penulis juga sampaikan maaf jika penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan yang penulis sengaja maupun tidak penulis sengaja, saran dan kritikan yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan dalam skripsi ini semakin baik lagi, dan kepada Allah SWT penulis beristighfar atas segala kekhilafan dan dosa yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT selalu menuntun penulis di jalan yang dikehendakiNya. Amin.

Yogyakarta, 21 Maret 2016

Riyan Agus Prasetyo



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari persoalan ketidakmampuan kelompok rentan dalam mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang layak. Pemerintah pusat sebenarnya sudah mempunyai program perlindungan sosial, namun masih banyak warga yang belum tercukupi program tersebut. Di Desa Panggungharjo ternyata ada juga program jaminan sosial melalui jaminan tiga kartu untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis bertanya tentang bagaimana konsep, bagaimana implementasi, dan bagaimana dampak jaminan sosial dengan inovasi tersebut.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif, data yang diperoleh dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskriptif atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh, dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode diantaranya adalah, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan, penulis menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan informan (sumber data) yang didasarkan atas pertimbangan tertentu, dengan cara penulis memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini ada 14 informan.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*: Dilihat dari penentuan peserta maka jaminan sosial di Desa Panggungharjo termasuk residual, dimana hanya melayani orang-orang marginal, baik karena kondisi ekonomi, atau karena tidak mendapatkan akses dari pemerintah pusat. Selanjutnya sumber dana JPS, tidak ada iuran dari kelompok rentan, akan tetapi ditanggung oleh Pemerintah Desa Panggungharjo atau pihak ketiga untuk mendanainya. Layanan program jaminan sosial di Desa Panggungharjo meliputi dua bidang yaitu kesehatan dan pendidikan dengan tiga kartu meliputi: Kartu Sehat, Kartu Ibu dan Anak, dan Kartu Pintar. *Kedua*, dilihat dari implementasi program jaminan sosial di Desa Panggungharjo sudah sesuai dengan Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS), hanya saja belum ada buku panduannya yang mengatur itu semua, dan dalam penelitian penulis, ternyata masih banyak masyarakat Desa Panggungharjo yang belum mengerti secara detail program JPS. *Ketiga*, dampak jaminan sosial yaitu: 1) Adanya JPS Kesehatan, kelompok rentan atau masyarakat miskin bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah, kesehatan mereka terjamin, terhindar dari kesengsaraan yang parah, terhindar dari resiko bayi lahir mati dan kematian ibu melahirkan. 2) Adanya JPS Pendidikan, menumbuhkan harapan-harapan baru bagi generasi selanjutnya, untuk mengakses pendidikan yang setinggi-tingginya karena adanya asuransi pendidikan.

***Kata Kunci: Jaminan Sosial, Inovasi Tiga Kartu***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Landasan Teori .....	18
G. Metode Penelitian .....	30
H. Sistematika Penulisan .....	42
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA PANGGUNG HARJO</b>	
<b>KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL DIY</b>	
A. Letak, Luas, dan Kondisi Geografis .....	44



B. Topografi Tanah dan Iklim Desa Panggungharjo .....	46
C. Kondisi Demografi .....	47
D. Mata Pencaharian Penduduk .....	47
E. Tingkat Pendidikan .....	49
F. Struktur Pemerintah Desa Panggungharjo .....	51
G. Sumber-sumber Pendapatan Desa .....	55
H. Gambaran Umum Badan Pelaksana JPS (Jaring Pengaman Sosial) .....	56

### **BAB III KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN DAMPAK JAMINAN**

#### **SOSIAL MELALUI INOVASI TIGA KARTU**

A. Konsep Jaminan Sosial Versi Desa Panggungharjo .....	67
B. Implementasi Jaminan Sosial melalui Inovasi Tiga Kartu .....	82
C. Dampak Jaminan Sosial melalui Inovasi Tiga Kartu .....	122

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	134

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tipologi/Konsep Jaminan Sosial dilihat dari Tiga Unsur .....	21
Tabel 2 Luas Pedukuhan Desa Panggungharjo .....	46
Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Panggungharjo Berdasarkan Jenis Kelamin .....	47
Tabel 4 Jumlah Penduduk Desa Panggungharjo Berdasarkan Mata Pencaharian ..	48
Tabel 5 Jumlah Penduduk Desa Panggungharjo Berdasarkan Jenis Usia Tingkat Pendidikan Umum .....	49
Tabel 6 Jumlah Penduduk Desa Panggungharjo Berdasarkan Jenis Usia Tingkat Pendidikan Khusus .....	50
Tabel 7 Sumber-sumber Desa Panggungharjo Berdasarkan Jenis Usia Tingkat Pendidikan Khusus .....	56
Tabel 8 Anggaran Bapel JPS (Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial) Tahun 2016 .....	66
Tabel 9 Konsep Jaminan Sosial Pemerintah Desa Panggungharjo .....	81
Tabel 10 Daftar Penerima Manfaat Kartu Pintar Bapel JPS Bumiputera Desa Panggungharjo Tahun 2013 .....	91
Tabel 11 Daftar Penerima Manfaat Kartu KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Bapel JPS Desa Panggungharjo Tahun 2015 dan 2016 .....	100
Tabel 12 Daftar Penerima Manfaat Kartu Pintar Bapel JPS-Bumiputera Desa Panggungharjo Tahun 2013 .....	112

Tabel 13 Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan Desa Panggunharjo	
Tahun 2015.....	115
Tabel 14 Daftar Penerima Bantuan Pembayaran Penunggakan SPP Tahun	
2015 .....	120



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Panggungharjo .....	45
Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Panggungharjo .....	53
Gambar 3 Visi dan Misi Desa Panggungharjo.....	55
Gambar 4 Gambar Kartu Sehat .....	85
Gambar 5 Penyerahan Kartu Sehat .....	89
Gambar 6 Kartu Kesehatan Ibu dan Anak .....	94
Gambar 7 Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRB) Laras Hati Akademi Kebidanan Yogyakarta .....	97
Gambar 8 Buku Kesehatan Ibu dan Anak .....	98
Gambar 9 Kartu Pintar .....	105
Gambar 10 Lounching Kartu Pintar .....	107
Gambar 11 Buku Polis Asuransi .....	109
Gambar 12 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi .....	109
Gambar 13 Surat Permohonan Bantuan Pembayaran Penunggakan Uang SPP .....	118

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul *Jaminan Sosial Versi Desa Melalui Inovasi Tiga Kartu (Studi Konsep, Implementasi, dan Dampak Jaminan Sosial Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. Agar tidak terjadi perluasan makna dalam pembahasan dan persepsi yang salah dalam memahami penelitian ini, maka penulis memperjelas beberapa pengertian yang dimaksud dalam judul penelitian ini, agar pembaca lebih mudah dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

#### 1. Jaminan Sosial Versi Desa melalui Inovasi Tiga Kartu

##### a. Jaminan Sosial Versi Desa

Jaminan sosial versi Desa Panggunharjo yang disebut dengan JPS (Jaring Pengaman Sosial), merupakan program desa yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat,<sup>2</sup> khususnya kelompok rentan. Tujuannya agar kebutuhan terhadap layanan kesehatan, layanan pendidikan yang setinggi-tingginya dan juga

---

<sup>2</sup> Keputusan Lurah Desa Panggunharjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS).



kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pangan yang sehat dapat tercukupi.<sup>3</sup>

Sedangkan jaminan sosial menurut negara (Indonesia) adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>4</sup>

#### **b. Inovasi Tiga Kartu**

Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan, atau bisa diartikan sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada, atau yang sudah dikenal sebelumnya (pembaharuan ‘bidang pengembangan kemasyarakatan’).<sup>5</sup> Tiga kartu disini adalah tiga bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah Desa Panggungharjo kepada masyarakatnya dengan model pemberian tiga kartu jaminan sosial, yaitu:

- a. Kartu KS (Kartu Sehat), yaitu kartu yang digunakan untuk menjamin pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang meliputi biaya konsultasi, pemeriksaan medis, biaya tindakan medis kecil atau sederhana, biaya pemeriksaan ibu hamil, nifas, menyusui,

---

<sup>3</sup> Dokumen Pengantar Laporan Pembangunan Desa Panggungharjo Tahun 2012/2013, hlm. 27.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 1 ayat (1).

<sup>5</sup> Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), hlm. 233.

biaya pemeriksaan balita, biaya pembelian obat sesuai obat sesuai daftar obat esensial nasional (DOEN) dan atau obat yang tersedia di PP-JPS kesehatan sesuai indikasi medis, dan biaya pelayanan kegawatdaruratan.

- b. Kartu KP (Kartu Pintar), merupakan kartu yang memberi jaminan pendidikan, terkait jenis layanannya berupa asuransi pendidikan dengan premi dibayar oleh Bapel JPS (Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial).
- c. Kartu KIA (Kartu Kesehatan Ibu dan Anak), merupakan kartu untuk mengakses 9 kali pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas dan 5 kali imunisasi lengkap untuk bayi.<sup>6</sup>

Jadi yang dimaksud dengan jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat Desa Panggungharjo agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dan dilaksanakan dengan skema yang melembaga, berupa jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin.

## **2. Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul**

Desa Panggungharjo merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian, secara administratif Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang secara langsung

---

<sup>6</sup> Dokumen Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul “Presentasi Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS)”.

berbatasan dengan Kota Yogyakarta yang merupakan Ibu Kota D.I Yogyakarta. Desa Panggungharjo terdiri dari 14 pedukuhan yang terbagi menjadi 118 Rukun Tetangga (RT) yang mendiami wilayah seluas 560,966,5 Ha.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas maka yang dimaksud *Jaminan Sosial Versi Desa Melalui Inovasi Tiga Kartu* ini adalah, penelitian terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa Panggungharjo dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya terhadap kelompok rentan. Agar kebutuhan terhadap layanan kesehatan, layanan pendidikan setinggi-tingginya, dan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pangan yang sehat dapat tercukupi.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan *problem* yang dihadapi oleh berbagai negara di belahan dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Edi Suharto, saat ini kemiskinan menjadi perhatian banyak orang, karena diyakini kemiskinan merupakan permasalahan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban, dan seluruh umat manusia di bumi ini sepakat, bahwa kemiskinan adalah permasalahan yang harus ditanggulangi.<sup>8</sup> Menurut M. Amien Rais dalam bukunya yang

---

<sup>7</sup> Dokumen Pengantar Laporan Pembangunan Desa Panggungharjo Tahun 2012/2013, hlm. 14.

<sup>8</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 14.

berjudul *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* mengatakan, kemiskinan merupakan kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar, dimana kualitas hidup di bawah dari apa yang bisa diharapkan.<sup>9</sup>

Indonesia belum bisa terlepas dari permasalahan kemiskinan, hasil dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tanggal 15 September 2015, tingkat kemiskinan di Indonesia naik dibandingkan tahun sebelumnya, baik itu kemiskinan yang ada di pedesaan maupun kemiskinan yang ada di perkotaan.<sup>10</sup> Kemiskinan masih menjadi persoalan yang mengawatirkan bagi kestabilan bangsa ini, yang harus segera dicegah dan ditanggulangi, agar persoalan kemiskinan tidak semakin akut.

---

<sup>9</sup> M. Amien Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 9.

<sup>10</sup> Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014, yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015. Selama periode September 2014 Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015). Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2015 tercatat sebesar 73,23 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2014 yaitu, sebesar 73,47 persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, tahu, dan kopi. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Badan Pusat Statistik, "*Presentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen*" [http://www.bps.go.id/index.php/brs/index?katsubjek=23&brs%5Btg\\_Rilis\\_In d%5D=&brs%5Btahun%5D=%Yt0=Cari](http://www.bps.go.id/index.php/brs/index?katsubjek=23&brs%5Btg_Rilis_In d%5D=&brs%5Btahun%5D=%Yt0=Cari), diakses tanggal 01 Oktober 2015.

Tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi sebagai penyebab kemiskinan yang terjadi di negara ini, salah satunya adalah banyaknya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).<sup>11</sup>

Selain KKN, kemiskinan juga diakibatkan oleh sistem ekonomi yang tidak berkeadilan, belum maksimalnya sistem jaminan sosial, budaya, atau akibat dari dampak perpolitikan suatu negara yang tidak berpihak pada rakyat miskin. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, tapi banyak faktor yang saling terkait sehingga menjadikan individu atau keluarga itu menjadi miskin. Edi Suharto mengatakan secara konseptual, setidaknya kemiskinan disebabkan oleh empat faktor. *pertama*, faktor individual, *kedua*, faktor sosial. *ketiga*, faktor kultural, dan *keempat*, faktor struktural.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, kemiskinan merupakan suatu keadaan yang membahayakan dan menakutkan, karena dampak dari

---

<sup>11</sup> Menurut data yang muat oleh *hukumonline.com* sebuah media informasi yang dapat diakses melalui internet menyebutkan. koordinator divisi investigasi dan publikasi ICW (Indonesia Corruption Watch), Tamas Langkun, mengatakan semester pertama 2014, terdapat 308 kasus korupsi dengan dengan jumlah tersangka 659 orang. Sedangkan semester kedua, terdapat 321 kasus korupsi dengan 669 orang tersangka, serta kerugian negara sebesar Rp 1,59 triliun. ICW, "*Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Periode 2014*", *Hukum Online*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014>. diakses tanggal 03 Oktober 2015.

<sup>12</sup> Empat faktor penyebab kemiskinan tersebut adalah: 1) Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya. 2) Faktor sosial, kondisi lingkungan-lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. 3) Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. 4) Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak *sensitive*, dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia*, hlm, 18.



kemiskinan sangat luar biasa, yang berakibat pada lemahnya mentalitas dan keimanan seseorang. Yusuf Qardhawi mengungkapkan, ada lima bahaya yang disebabkan oleh kemiskinan, yaitu: *Pertama*, kemiskinan membahayakan akidah. *Kedua*, kemiskinan membahayakan akidah dan moral. *Ketiga*, kemiskinan mengancam kestabilan pemikiran. *Keempat*, kemiskinan membahayakan keluarga. *Kelima*, kemiskinan mengancam masyarakat dan kestabilannya.<sup>13</sup>

Sebagian orang salaf mengatakan, bila seorang miskin pergi ke suatu negeri, maka kekafiran akan berkata kepadanya, “*bawalah saya bersamamu*”. Jadi tidaklah mengherankan apabila Rasulullah SAW juga bersabda: “*Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran*”.<sup>14</sup> Perlu dipahami bersama, bahwa Allah SWT memuliakan rasulNya dengan kecukupan. Seperti firman Allah SWT : “*Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan*”.<sup>15</sup>

Ayat di atas memperkuat, bahwa tidak ada anjuran bagi umat Islam khususnya dan pada umat manusia pada umumnya untuk memiskinkan diri. Allah SWT juga menganjurkan pada umatNya untuk menghindari kemiskinan, karena jika umat Islam kuat, tidak akan ada lagi saudara-saudara sesama muslim maupun non muslim yang kelaparan, menderita dan tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya.

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 24-29.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>15</sup> *Al-Quran*, 93:8.

Jika dilihat dari sudut pandang negara, merujuk pada pembukaan UUD tahun 1945, seharusnya angka kemiskinan di Indonesia semakin menurun tidak malah meningkat setiap tahunnya, karena secara jelas dalam pembukaan UUD tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.<sup>16</sup> Tujuan dari jaminan sosial ini adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya.<sup>17</sup>

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak kebijakan-kebijakan yang seperti halnya Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dari beberapa program yang telah dibuat nyatanya belum bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di negeri ini. Merujuk pada data yang dirilis oleh BPS pada tanggal 02 Januari 2015, bahwa pada September 2014 jumlah penduduk miskin hanya berkurang 0,55 juta orang dibandingkan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 3.

dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang.<sup>18</sup>

Sedangkan di era Jokowi Widodo dan Yusuf Kalla (2015-2020), juga mengeluarkan program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial. Seperti yang dimuat di blog Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.<sup>19</sup>

Seperti halnya di pemerintah Provinsi Yogyakarta, juga memberikan pelayanan jaminan sosial bagi masyarakatnya, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan gubernur tersebut menyebutkan, bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sekaligus untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Miskin September 2014 Mencapai 27,73 Juta Orang*, <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1099>, diakses tanggal 03 Oktober 2015.

<sup>19</sup> Sekretariat Kabinet, “*Inilah Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*”, <http://setkab.go.id/inilah-peraturan-presiden-tentang-program-percepatanpenanggulangan-kemiskinan/>, diakses tanggal 03 Oktober 2015..

<sup>20</sup> *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta.*

Selain dalam skala nasional, provinsi, kabupaten juga memberikan jaminan sosial bagi masyarakatnya, seperti halnya di Kabupaten Bantul yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut menyebutkan, bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, selain itu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.<sup>21</sup>

Tidak hanya, dalam skala nasional, provinsi, maupun kabupaten, pemerintahan desa juga ada yang berusaha membuat peraturan-peraturan yang bisa memproteksi (melindungi) masyarakatnya dari jeratan kemiskinan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan, dengan memberikan jaminan sosial melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS), sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang pembentukan Bapel JPS (Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.

<sup>22</sup> Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS).

Bapel JPS adalah badan desa yang didirikan oleh pemerintah desa untuk menyelenggarakan program JPS (jaring pengaman sosial), jaring pengaman sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat Desa Panggungharjo, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dengan menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa dan atau masyarakat.<sup>23</sup> Program ini bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Desa Panggungharjo itu sendiri.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini merupakan salah satu bentuk program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah Desa Panggungharjo dalam rangka untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan agar tidak semakin terjatuh dalam jurang kemiskinan. Program ini dikelola oleh Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS), dengan jargon “*Agar Senyum Kembali Berkembang*”. Program ini diadakan sejak tahun 2013, pada masa kepemimpinan Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, yang saat ini masih menjabat sebagai kepala Desa Panggungharjo.

Sebenarnya sudah banyak kebijakan maupun peraturan pemerintah pusat yang mengatur tentang perlindungan sosial atau jaminan sosial kepada warganya, akan tetapi sampai dewasa ini belum memberikan dampak secara signifikan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian, dan mengkaji

---

<sup>23</sup> Dokumen Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul “Presentasi Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (BAPEL JPS)”.

lebih dalam lagi terkait salah satu inovasi program pemerintah Desa Panggungharjo dalam memberikan perlindungan sosial dengan layanan jaminan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan bagi warganya melalui inovasi tiga kartu.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa hal yang penulis kira menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam, kemudian dijadikan sebagai rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana konsep jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu versi Desa Panggungharjo?
2. Bagaimana implementasi jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu versi Desa Panggungharjo?
3. Bagaimana dampak jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu versi Desa Panggungharjo bagi penerima kartu tersebut?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konsep jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu versi Desa Panggungharjo.
2. Mendeskripsikan implementasi jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu versi Desa Panggungharjo.

3. Mendeskripsikan dampak jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu versi Desa Panggunharjo bagi penerima kartu tersebut.

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, diantara kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran baru bagi pengembangan jaminan sosial, yang selama ini secara teoritis hanya dilakukan oleh negara yang mempunyai sumberdaya keuangan banyak, kemudian secara teoritis dan aplikatif ternyata jaminan sosial bisa dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis dapat memberikan evaluasi terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan jaminan sosial yang selama ini sudah dilakukan.
- b. Dapat memberikan contoh bagi desa-desa lain yang ada di Indonesia, bahwa jaminan sosial bisa dilakukan dan dikembangkan di pemerintahan desa, dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakatnya yang rentan kemiskinan.

## **E. Kajian Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan memang sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti lainnya, akan tetapi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang melalui jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu versi desa, yang pemerintah Desa

Panggunharjo menyebutnya dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di tingkat desa atau kelurahan, penulis belum pernah menemukan. Akan tetapi untuk menghindari duplikasi atau pengulangan penulisan, penulis menyertakan telaah pustaka yakni beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Supardiono, meneliti tentang *Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)*. Penelitian ini fokus pada norma-norma yang ada dalam hukum Islam, dan juga yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maupun norma-norma yang ada dalam hukum Islam sama-sama mengakui bahwa jaminan sosial adalah hak asasi manusia dan pemenuhannya merupakan tanggungjawab negara maupun masyarakat. Perbedaannya adalah, tanggungjawab negara terhadap hak jaminan sosial rakyatnya dalam hukum Islam bersifat aktif, yaitu berupa *provisi positif*, melalui waris dan zakat, serta *prohibitif*/larangan-larangan. Sementara tanggungjawab negara terhadap hak jaminan sosial rakyat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bersifat pasif, yaitu pemerintah membayarkan iuran peserta yang tidak mampu.



2. Rachma Suci Arrianti, meneliti tentang *Penanggulangan Kemiskinan di Dusun Ceme, Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta*. Penelitian ini fokus pada masalah penyebab kemiskinan dan upaya mengatasinya melalui kegiatan yang dimotivasi oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), seperti perbaikan sarana jalan masuk kampung, pelatihan (menjahit, memasak, dan pembuatan sabun) dan bantuan hewan ternak (kambing), dan usaha rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: *Pertama*, penyebab kemiskinan di Dusun Ceme, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, pendapatan yang masih rendah, serta sarana irigasi yang kurang memadai. *Kedua*, dalam menangani masalah kemiskinan, Dusun Ceme melakukan cara untuk mengatasinya melalui beberapa program yang diberikan melalui BKM dan usaha rumah tangga (*Home Industry*). *Ketiga*, untuk ketrampilan kursus menjahit hasilnya kurang efektif karena belum bisa menegembangkan usahanya sendiri, namun untuk kursus memasak, pembuatan sabun serta bantuan hewan ternak kambing hasilnya sudah bisa dirasakan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat Dusun Ceme. Bagi usaha rumah tangga (*Home Industry*) yang dilakukan Dusun Ceme belum adanya pendampingan baik dari *skill* maupun permodalan.
3. Rima Fitriani, meneliti tentang *Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Kemiskinan*

*Melalui Kartu Menuju Sejahtera.* Penelitian ini fokus pada strategi yang dilakukan oleh Dinkes Kota Yogyakarta untuk mengurangi penyandang masalah kemiskinan serta meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial, melalui kebijakan KMS (Kartu Menuju Sejahtera) sehingga akses pendidikan dapat terjangkau di semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dengan dicanangkannya Program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) oleh pemerintah Kota Yogyakarta, program pengentasan kemiskinan dapat diatasi secara berangsur.

4. Imam Munajat, meneliti tentang *Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Studi Terhadap Konsep, Implementasi, dan Dampak P2KP di Kelurahan Karangwaru Yogyakarta.* Penelitian ini fokus pada upaya Badan Keswadayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan, melalui telaah konsep dasar, implementasi konsep, dan dampak pelaksanaan P2KP di Kelurahan Karangwaru Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana berkurangnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun yang terjadi di Indonesia secara umum, khususnya

di wilayah perkotaan adalah kemiskinan struktural yaitu kondisi miskin yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Asy'ari, meneliti tentang *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Demangan Gondokusuman, Studi atas pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*. Fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) dan tanggapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinaan Di Perkotaan (P2KP). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang digunakan dalam pemberdayaan miskin Demangan adalah: *Pertama*, penyelenggaraan konsep Tribina (bina sosial, bina ekonomi, dan bina lingkungan). *Kedua*, pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif. *Ketiga*, penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru. *Keempat*, peningkatan partisipasi masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan atau diwujudkan. *Kelima*, pendampingan pada kelompok swadaya masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terdapat kesamaan dalam fokus kajian penelitiannya, yaitu tentang penanggulangan kemiskinan, akan tetapi objek kajian dan lembaganya berbeda. Fokus penulis dalam penelitian ini sangat berbeda dengan kelima peneliti di atas, penelitian ini

fokus pada perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panggungharjo terhadap masyarakatnya yang miskin, melalui pemberian jaminan sosial dengan inovasi tiga kartu yang mereka sebut dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) agar masyarakat yang kurang mampu terjamin kebutuhan dasarnya. Implementasi dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu, dengan model tiga kartu diantaranya adalah, Kartu Sehat (KS), Kartu Pintar (KP), dan Kartu Ibu dan Anak (KIA). Sejauh penelusuran penulis, hal ini belum pernah diteliti, maka dari itu penelitian ini masih menarik dan sangat layak untuk diteliti.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Jaminan Sosial dan Bentuk Negara Kesejahteraan**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan landasan teori dengan menggunakan teori konsep jaminan sosial yang digunakan oleh negara, dan tipologi konsep jaminan sosial di negara kesejahteraan. Dengan alasan konsep jaminan sosial yang ada di pemerintah Desa Panggungharjo hampir sama dengan konsep kebijakan jaminan sosial yang digunakan oleh negara saat ini. Begitupun konsep jaminan sosial di Desa Panggungharjo, juga hampir sama dengan salah satu tipologi konsep jaminan sosial yang ada di negara kesejahteraan. Akan tetapi bentuk implementasi, tujuan dan penyebutan pengertian bisa saja berbeda, nantinya diharapkan hasil dari skripsi ini bisa mendeskripsikan perbedaan dan perbandingan antara kedua konsep

tersebut, sehingga tidak hanya menggambarkan hasil dari kebijakan tapi menemukan formulasi atau teori baru dalam penelitian ini.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dijelaskan penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan berkehidupan yang layak. Dalam penjelasan undang-undang tersebut pengertian jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian negara kesejahteraan adalah, peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.<sup>25</sup> Berdasarkan tipologi rezim kesejahteraan, Esping-Anderson membagi negara kesejahteraan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1. *Residual welfare state*, yang meliputi negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat dengan basis rezim kesejahteraan liberal dan dicirikan oleh jaminan sosial yang

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>25</sup> Dharmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagyo, *Mandatory: Politik Negara Kesejahteraan di Tanah Republik*, (Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2007), hlm. 19.

terbatas terhadap kelompok target yang selektif serta dorongan yang kuat bagi pasar untuk mengurus pelayanan publik.

2. *Universalist welfare state*, yang meliputi negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Belanda dengan basis rezim kesejahteraan sosial-demokrat dan dicirikan oleh cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target yang luas serta tingkat de-komodifikasi yang ekstensif.
3. *Social insurance welfare state*, yang meliputi negara seperti Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Italia dan Spanyol dengan basis rezim kesejahteraan konservatif dan dicirikan oleh sistem jaminan sosial yang tersegmentasi dan peran penting keluarga sebagai penyedia pasok kesejahteraan.<sup>26</sup>

## 2. Konsep Jaminan Sosial

Konsep jaminan sosial bisa dilihat dari beberapa unsur, yang *pertama*, dari penyelenggara jaminan sosial adalah negara, unsur yang dijamin atau penerimanya semua warga negara, dan sumber dananya ditanggung oleh negara. *Kedua*, penyelenggara jaminan sosial adalah negara, unsur yang dijamin atau penerimanya adalah kelompok rentan (warga miskin), dan sumber dananya ditanggung oleh pemerintah. Dan *ketiga*, penyelenggara jaminan sosial adalah swasta, unsur yang dijamin atau penerimanya adalah peserta yang telah membayar iuran,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

dan sumber dananya ditanggung oleh peserta jaminan sosial. Lebih rincinya akan dijelaskan dalam bentuk tabel.<sup>27</sup>

**Tabel: Tipologi/Konsep Jaminan Sosial dilihat dari Tiga Unsur Konsep Jaminan Sosial**

<b>Konsep Jaminan Sosial</b>				
<b>No</b>	<b>Bentuk</b>	<b>Universal</b>	<b>Residual</b>	<b>Social Insurance</b>
1	Penyelenggara	Negara	Negara	Swasta
2	(Unsur yang dijamin) Peseta	Semua	Yang Rentan	Yang Iuran
3	Sumber Dana	Negara	Negara	Iuran Peserta

#### **a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, diselenggarakan oleh suatu badan yang dibentuk oleh undang-undang. Di dalamnya dijelaskan, bahwasanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud adalah:

1. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

2. Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).
4. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
5. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).<sup>28</sup>

**b. Peserta**

Kepesertaan jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, adalah semua warga negara Indonesia, orang asing bisa menggunakan layanan program ini, ketika mereka sudah bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, dan telah membayar iuran.<sup>29</sup> Di dalamnya juga dijelaskan setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu, besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program.<sup>30</sup>

Dalam jaminan sosial ini, ada dua kategori peserta, yang pertama adalah peserta yang wajib membayar iuran, dan kedua peserta yang tidak wajib membayar iuran. Peserta yang wajib

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 5 ayat (1).

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 1 ayat (8).

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 17 ayat (1).



membayar iuran adalah peserta yang tidak termasuk dalam kelompok fakir miskin atau kurang mampu, dan orang tidak mampu yang iuranya di bayar oleh pemerintah.<sup>31</sup>

### **c. Sumber Dana**

Sumber dana jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah, iuran peserta yang dibayarkan kepada badan penyelenggara jaminan sosial, selanjutnya dana tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Penyelenggara jaminan sosial. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa, dana jaminan sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.<sup>32</sup>

### **d. Unsur Program Jaminan Sosial**

Dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Ada 5 (lima) jenis program jaminan sosial. Meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 1 ayat (5).

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 47 ayat (1).

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 19.

## 1) Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.<sup>34</sup>

### a) Tujuan

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat, pemeliharaan kesehatan, dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

### b) Peserta

Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, anggota keluarga peserta juga berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Dan Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

### c) Manfaat

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan, berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan iuran biaya.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 19 ayat (1).

## 2) Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.<sup>35</sup>

### a) Tujuan

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan, dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

### b) Peserta

Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran.

### c) Manfaat

Manfaat jaminan kecelakaan kerja diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat, dan menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam keadaan darurat, pelayanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kecelakaan kerja yang terjadi di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi kebutuhan medis bagi peserta, Badan

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 29 ayat (1).

Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi. Peserta yang membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar.

### **3) Jaminan Hari Tua**

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

#### **a) Tujuan**

Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

#### **b) Peserta**

Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran.

#### **c) Manfaat**

Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan

seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.<sup>36</sup>

#### 4) Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.<sup>37</sup>

##### a) Tujuan

Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti, dan usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### b) Peserta

Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran.

##### c) Manfaat

Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai: Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia. Pensiun

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 35 ayat (1).

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 39 ayat (1)

cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Pensiun janda atau duda, diterima janda atau duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi.

Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **5) Jaminan Kematian**

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.<sup>38</sup>

##### **a) Tujuan**

Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan, untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

##### **b) Peserta**

Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

##### **c) Manfaat**

Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 47 ayat (1).

diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu.

### **3. Implementasi Jaminan Sosial**

Pengertian Implementasi menurut *Kamus Ilmiah Populer* adalah pelaksanaan,<sup>39</sup> sedangkan menurut Cochran dan E. F. malone menjelaskan bahwa implementasi berarti melaksanakan kebijakan atau pengoperasian program-program, dan ada tiga syarat yang harus dipenuhi bagi implementasi yang efektif. Yaitu: *Pertama*, kebijakan itu harus ditetapkan atau dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan konsisten dengan tujuan kebijakan yang lain. *Kedua*, kebijakan mendapatkan legitimasi yang kuat. Dan *ketiga*, bila implementasi kebijakan menyangkut agensi pemerintahan pada level pusat, provinsi, dan lokal maka diperlukan koordinasi yang kuat dan intensif.<sup>40</sup>

### **4. Dampak Jaminan Sosial**

Dampak dari perlindungan sosial menurut Edi Suharto bisa dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah:

1. Tercegahnya atau berkurangnya resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan.

---

<sup>39</sup> Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), hlm. 222.

<sup>40</sup> Muh. Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, (Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2014), hlm, 7.2-7.3.

2. Meningkatnya kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakamanan sosial-ekonomi.
3. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.<sup>41</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, Desa Panggungharjo adalah desa yang mendapatkan juara nomor 1 (satu) dalam lomba pemberdayaan desa se-Indonesia pada tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan menjadi desa percontohan untuk saat ini. Selain itu juga banyak prestasi yang diraih, diantaranya adalah: Juara I Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Nasional tahun 2013, menjadi proyek percontohan Desa Ramah Anak Tahun 2013 oleh BPPM DIY, Juara I lomba Gugus PAUD dan SPS Tingkat Bantul Tahun 2013, Juara I lomba HATINYA PKK tingkat Bantul tahun 2013, Juara I perlombaan

---

<sup>41</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm, 89.



Petani Berprestasi tingkat kabupaten tahun 2014, dan 5 nominator penerima Eagle Award tahun 2014 untuk Kampong Dolanan.<sup>42</sup>

*Kedua*, variasi dan inovasi pemerintahan Desa Panggungharjo dalam melakukan konsep perlindungan sosial, yang melalui jaminan sosial dengan inovasi tiga kartu yang diberikan kepada kelompok rentan.<sup>43</sup> *Ketiga*, untuk tingkat desa, Desa Panggungharjo, merupakan satu-satunya desa yang memiliki program jaminan sosial dengan inovasi tiga kartu JPS, yaitu: (Kartu Pintar, Kartu Sehat, dan Kartu Kesehatan Ibu dan Anak).<sup>44</sup> Dan alasan *keempat* adalah, untuk mengetahui konsep, implementasi, dan dampak dari jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu yang dilakukan pemerintah Desa Panggungharjo dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat desa khususnya kepada kelompok rentan atau masyarakat miskin.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskriptif atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh, dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang

---

<sup>42</sup> Dokumen Profil Desa Panggungharjo Tahun 2012/2013.

<sup>43</sup> Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS).

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggoro Hadi sebagai Lurah Desa Panggungharjo pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, pukul 17:05 WIB.

diamati.<sup>45</sup> Penelitian tentang “*Jaminan Sosial Versi Desa Melalui Inovasi Tiga Kartu (Studi Konsep, Implementasi, dan Dampak Jaminan Sosial Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*”, menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Alasan memilih pendekatan ini adalah yang *pertama*, karena pendekatan ini bersifat deskriptif sehingga mudah dalam memulai alur cerita.

*Kedua*, pendekatan ini lebih mampu dalam menjawab apa saja yang berkaitan dengan “*Jaminan Sosial Versi Desa Melalui Inovasi Tiga Kartu (Studi Konsep, Implementasi, dan Dampak Jaminan Sosial Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*”, dalam hal ini menjelaskan bagaimana konsep, implementasi, dan dampak dari jaminan sosial melalui tiga kartu dalam memberikan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan atau masyarakat miskin di Desa Panggunharjo. *Ketiga*, pendekatan ini mampu membuat hubungan dengan subjek-subjek sasaran penelitian lebih akrab untuk melakukan penelitian guna mencari fakta-fakta yang di temukan di lapangan. Selain itu juga dapat menemukan realita di lapangan untuk mengembangkan teori yang sudah ada ataupun menemukan teori-teori baru.

---

<sup>45</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 3.

### **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber-sumber informasi dalam penelitian ataupun seseorang yang memberikan keterangan mengenai apa yang ingin didapatkan oleh peneliti. Dalam melakukan subjek penelitian yang baik, terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan, yakni mereka telah cukup lama berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, terlibat penuh dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.<sup>46</sup> Hal ini dimaksudkan agar dalam mencari data tidak mengalami kesulitan, dalam penelitian ini yang menjadi sumber penelitian adalah aparatur pemerintah Desa Panggungharjo, yaitu Lurah Desa, Kasie-Kemasyarakatan Desa, Ketua Bapel JPS (Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial) dan dua anggotanya, serta tiga informan penerima manfaat dari JPS Kesehatan, 4 informan JPS Pendidikan, Kepala Dukuh Pandes, dan Kepala Dukuh Sawit.

### **4. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian pada suatu penelitian.<sup>47</sup> Objek dalam penelitian ini adalah Konsep, implementasi dan dampak Jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu versi Desa Panggungharjo.

---

<sup>46</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1993), hlm. 91.

## 5. Teknik Penarikan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman atau guru dalam penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori, menguji teori, atau mengembangkan teori yang sudah ada.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini teknik pengambilan informan dilakukan dengan *purposive* yaitu teknik pengambilan informan sumber data yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, adalah orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Jadi penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan informan lainnya, yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.<sup>49</sup> Dari *purposive* ini, penulis mewancarai informan yang

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 364.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 368-369.

mendapatkan kartu jaminan sosial dengan jumlah 7 (tujuh) orang, dan informan yang mengurus (pelaksana) program jaminan sosial berjumlah 7 (tujuh) orang.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara tatap muka atau disebut dengan wawancara personal (*personal interview* atau *one-on-one interview*) dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat kerja atau tempat tinggal informan atau mengundang informan ke tempat peneliti.<sup>50</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur (*struktur interview*) yaitu suatu pertanyaan baku (standar) yang telah disiapkan sebelumnya, dan pewawancara memiliki kebebasan luas dalam mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan.<sup>51</sup> Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

---

<sup>50</sup> Morissan. *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 223.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>52</sup>

Dalam skripsi ini penulis menggunakan kedua jenis wawancara tersebut, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur selalu penulis gunakan setiap wawancara dengan informan, akan tetapi ketika dalam wawancara terstruktur ini penulis menemui permasalahan saat wawancara, seperti halnya ketika jawaban dari informan belum sesuai dengan yang diharapkan, atau belum mewakili jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur.

Tujuan peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret. Dalam wawancara ini peneliti mencari data dari pemerintah Desa Panggungharjo dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat langsung dalam jaminan sosial tersebut. Dalam hal wawancara ini yaitu tentang bagaimana konsep kebijakan pemerintah Desa Panggungharjo dalam menanggulangi kemiskinan melalui jaminan sosial dengan inovasi tiga kartu.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 233.

## **b. Observasi**

Metode observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuisisioner, rekaman gambar, rekaman suara.<sup>53</sup>

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi dengan rekaman gambar, bukti-buktinya bisa dilihat dalam bab 2 dan bab 3. Pada observasi ini lebih ditekankan pada pengamatan yang tampak dari kebijakan jaminan sosial seperti halnya implementasi atau pelaksanaan program jaminan sosial, dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial.

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang dipandang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, baik mengenai letak geografisnya, visi dan misi, program-program jaminan sosial, monografi, data kemiskinan, keuangan dan sumber-sumber pendapatan desa. Data-data tersebut penulis dapatkan dari Pengantar Laporan Pembangunan Desa

---

<sup>53</sup> Arikunto, "Prosedur Penelitian", hlm. 129.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

Panggunharjo Tahun 2012/2013, dokumen Peraturan Desa No. 15 Tahun 2015 tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun Anggaran 2016, Data Monografi Desa Semester I tahun 2015, dan Dokumen Profil Desa Panggunharjo Tahun 2012/2013.

## 7. Validitas Data

Validitas data digunakan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, cara memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan pengecekan data dengan triangulasi.<sup>55</sup> Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.<sup>56</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode, data-data dalam penelitian ini didapatkan melalui metode observasi, wawancara mendalam, dan pemanfaatan dokumentasi. Untuk membuktikan kevalidan data tersebut, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi. Contoh pada proses ini, penulis mewawancarai Bapak Kasie

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 327.

<sup>56</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 330.



Kemasyarakatan terkait pelaksanaan program KIA (Kartu Ibu dan Anak) pemerintah Desa Panggunharjo, yang bermitra dengan BPRB (Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin) Laras Hati Akademi Kebidanan Yogyakarta. Penulis lihat dalam Pengantar Laporan Pembangunan Desa Panggunharo Tahun 2012/2013, bahwa hal itu memang benar adanya.

- 2) Membandingkan data hasil wawancara dengan observasi. Contohnya pada proses ini penulis mewawancarai Bapak Jamilludin sebagai ketua Bapel JPS (Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial) dengan memberi pernyataan terkait penerima Kartu Pintar adalah masyarakat miskin. Hasil wawancara ini penulis perkuat dengan observasi di lapangan.

## **8. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan maupun orang lain.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan proses analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga proses. *Pertama*,

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 402.

reduksi data, *kedua*, penyajian data, dan *ketiga*, menarik kesimpulan atau verifikasi.

#### **a. Reduksi Data**

Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan, maka perlu dicatat dan dirinci secara teliti, semakin lama penulis ke lapangan maka data semakin banyak dan kompleks, untuk itu perlu dilakukan dianalisis melalui reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang pokok dan yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>58</sup>

Reduksi data ini penulis lakukan ketika proses transkrip wawancara, setelah pentranskripsi hasil wawancara selesai selanjutnya penulis pilih sesuai kebutuhan penelitian. Transkrip yang dirasa tidak perlu maka penulis abaikan, sebaliknya jika transkrip wawancara dirasa penting maka penulis masukan sebagai hasil. Contohnya ketika penulis bertanya kepada Bapak Sunarno selaku Kasie Kemasyarakatan Desa Panggunharjo, terkait jumlah penerima Kartu Pintar, dia menjawab sekitar 11 anak. Ketika penulis bertanya kepada Bapak Wahyudi selaku Kepala Desa Panggunharjo, penulis mendapatkan penerima Kartu Pintar yang

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 92.

jelas melalui dokumen Laporan Pembangunan Desa, sehingga transkrip wawancara dari Bapak Sunarno penulis abaikan, dan penulis menggunakan hasil transkrip dari Bapak Wahyudi.

#### **b. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.<sup>59</sup>

Dalam skripsi ini penyajian data yang digunakan penulis adalah bentuk teks naratif, tabel, dan bagan. Dalam proses ini penulis lakukan ketika penyusunan bab 2 dan bab 3, pada bab ini penulis menyimpulkan beberapa pernyataan dari informan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Contoh dalam penelitian ini penulis menggunakan teori jaminan sosial, di dalam bab 3 penulis menjelaskan konsep jaminan sosial dengan beberapa sub.

---

<sup>59</sup> Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", hlm. 95.

### **c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi**

Langkah ketiga ini, Miles dan Huberman, mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.<sup>60</sup> Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>61</sup>

Dalam skripsi ini, penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi jawaban dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis. Proses terakhir ini penulis lakukan pada bab 4, dengan menjadikan rumusan masalah dan dijawab pada bab 4 tersebut.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dan beberapa bab terdiri dari beberapa sub-bab, yang disusun secara sistematis, yang akan penulis uraikan dalam sistematika pembahasan. BAB I, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

---

<sup>60</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 242-249.

<sup>61</sup> Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", hlm. 99.

penelitian, kajian pustakan, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi gambaran umum lokasi, dari letak, luas dan kondisi geografis. Topografi, tanah dan iklim Desa Panggungharjo. Kondisi demografi, mata pencahariaan penduduk, tingkat pendidikan, struktur pemerintah Desa Panggungharjo, sumber-sumber pendapatan desa, dan gambaran umum Bapel JPS (Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial).

BAB III, berisi tentang konsep, implementasi, dan dampak jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu versi Desa Panggungharjo.

BAB IV, berisi penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan beberapa hasil dari penelitian yang sudah dilakukan di lapangan, kesimpulan tersebut berdasarkan refleksi dari bab-bab sebelumnya. Agar mudah dipahami oleh pembaca, dalam bab ini penulis sajikan beberapa pokok-pokok temuan penelitian yang merupakan rumusan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.

Jaminan sosial versi Desa Panggungharjo, merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kelompok rentan atau masyarakat miskin agar kesehatan dan pendidikan terjamin. Jaminan sosial tersebut diimplementasikan melalui inovasi tiga kartu JPS (Jaring Pengaman Sosial), yang berupa Kartu Sehat, Kartu Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kartu Pintar.

Jika dibuat pointer maka penelitian ini menemukan:

1. Konsep jaminan sosial yang dibuat oleh pemerintah Desa Panggungharjo, beda dengan konsep jaminan sosial yang dibuat oleh negara. Sumber dana jaminan sosial yang ada di negara itu dari iuran peserta, akan tetapi sumber dana jaminan sosial yang ada di Desa Panggungharjo bersumber dari dana desa dan bantuan pihak ketiga dalam hal ini adalah mitra desa. Dan peserta dari jaminan sosial yang

ada di negara adalah yang membayar iuran, jika di Desa Panggungharjo adalah kelompok rentan atau masyarakat miskin.

Jika dilihat dari kaca mata negara kesejahteraan konsep jaminan sosial yang ada di Desa Panggungharjo termasuk dalam tipologi *residual welfare state*, yang dicirikan oleh jaminan sosial yang terbatas terhadap kelompok target yang selektif (masyarakat miskin). Yang membedakan dengan *residual welfare state* adalah hanya di pelaksana program tersebut, jika dalam *residual welfare state* pelaksananya adalah negara, jika jaminan sosial di Desa Panggungharjo pelaksananya adalah pemerintah desa.

2. Implementasi program jaminan sosial di Desa Panggungharjo sudah sesuai dengan Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS), hanya saja belum ada buku panduannya yang mengatur itu semua. Dan dalam penelitian penulis ternyata masih banyak masyarakat Desa Panggungharjo yang belum mengerti secara detail program JPS (Jaring Pengaman Sosial).

Dalam pengimplementasian program jaminan sosial, ada dua bentuk jaminan sosial yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Panggungharjo. *Pertama* JPS Kesehatan. Ada beberapa layanan yang diberikan dalam JPS Kesehatan, diantaranya adalah layanan kesehatan untuk kelompok rentan atau masyarakat miskin, penderita penyakit kronis, dan difable, yang diwujudkan dengan adanya Kartu KS (Kartu

Sehat). Untuk mensukseskan program tersebut pemerintah Desa Panggungharjo bekerjasama dengan Rumah Sehat Baznas Bantul, dan semua layanan yang diberikan kepada penerima Kartu KS, semuanya gratis.

Selain itu, ada lagi jaminan kesehatan yang diberikan khusus kepada ibu dan anak, dengan pemberian layanan purna yang meliputi 9 kali pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, pemeriksaan nifas dan lima paket imunisasi lengkap bagi bayi. Hal ini diwujudkan dengan Kartu KIA (Kartu Ibu dan Anak), dalam program tersebut pemerintah Desa Panggungharjo bekerjasama dengan BPRB (Balai Pengobatan Rumah Bersalin) Laras Hati, semua layanan yang diterima oleh penerima Kartu KIA semuanya gratis.

Kedua, JPS Pendidikan. Dalam JPS Pendidikan ada beberapa layanan pendidikan yang diberikan kepada penerima layanan pendidikan dalam hal ini adalah kelompok rentan atau masyarakat miskin, ada yang berwujud kartu, dan ada yang tidak berwujud kartu. Layanan yang berwujud kartu adalah layanan asuransi pendidikan, yang diwujudkan dengan Kartu KP (Kartu Pintar). Kartu ini diberikan kepada masyarakat yang tergolong sangat rentan kemiskinan, dan melalui verifikasi yang sangat selektif. Tujuan dari Kartu KP adalah agar penerima manfaat kartu tersebut bisa meneruskan pendidikan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi, dalam pelaksanaan program



Kartu KP, pemerintah Desa Panggungharjo bekerjasama dengan Asuransi Jiwa Bumiputera.

Layanan yang tidak berwujud kartu adalah layanan untuk anak putus sekolah, dan layanan penanganan penunggakan biaya SPP. Layanan anak putus sekolah diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah dengan pemberian pelatihan kewirausahaan, dengan tujuan agar mereka memiliki jiwa enterpreneur, agar bisa mengangkat derajat ekonomi mereka.

Selanjutnya adalah layanan penanganan penunggakan biaya SPP, layanan ini juga tidak berwujud kartu, karena sifatnya insidensial yaitu ketika ada masyarakat yang mempunyai masalah tunggakan biaya SPP, dan mereka memohon bantuan kepada pemerintah desa. Layanan ini juga tidak langsung diberikan tapi melalui verifikasi terlebih dahulu dari tim Bapel JPS, dengan cara melakukan survey langsung ke sekolah pemohon bantuan, kemudian ditentukan layak atau tidaknya menerima layanan tersebut.

3. Jaminan sosial yang dibuat oleh pemerintah Desa Panggungharjo, sangat berdampak pada kehidupan masyarakat rentan atau fakir miskin. Adanya JPS Kesehatan, kelompok rentan atau masyarakat miskin bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah, kesehatan mereka terjamin, terhindar dari kesengsaraan yang parah, terhindar dari resiko bayi lahir mati dan kematian ibu melahirkan. Dengan

pemberian layanan kesehatan gratis tersebut, secara otomatis mengurangi beban pengeluaran ekonomi mereka.

Begitupun dampak JPS Pendidikan, adanya JPS Pendidikan sangat berdampak pada kelompok rentan atau masyarakat miskin. Karena menumbuhkan harapan-harapan baru bagi generasi mereka selanjutnya, untuk mengakses pendidikan yang setinggi-tingginya.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dan beberapa kali memahami hasil penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran secara objektif sesuai dengan topik pembahasan. Tidak ada maksud lain dalam pemberian saran ini kecuali hanya untuk kebaikan dan kemajuan Desa Panggungharjo, agar tetap menjadi desa percontohan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan jaminan sosial yang dibuat oleh pemerintah Desa Panggungharjo, yang diantaranya berwujud Kartu JPS (Jaring Pengaman Sosial), tentunya masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program, maupun pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat program. Maka dari itu, guna kebaikan program JPS agar kedepannya semakin baik lagi, ada beberapa saran untuk Bapel JPS (badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial) dan pemerintah Desa Panggungharjo. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Membuat buku pedoman pelaksanaan Bapel JPS, sebagai pemandu berjalannya program. Mengingat selama ini belum ada buku pedoman

yang dibuat oleh Bapel JPS. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan JPS bisa berjalan lebih sistematis, dan efektif.

2. Tata kelola administrasi dan pendataan di Bapel JPS harus diperbaiki kembali, berdasarkan temuan penulis di lapangan masih ada beberapa data penerima Kartu JPS yang alamatnya tinggalnya tidak sesuai dengan alamatnya yang sebenarnya.
3. Sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat harus ditingkatkan kembali, berdasarkan temuan di lapangan masih banyak masyarakat Desa Panggunharjo yang belum mengetahui dan memahami secara detail program dari Bapel JPS.
4. Publikasi program Bapel JPS lebih ditingkatkan lagi, agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses semua informasi yang ada di Bapel JPS dengan mudah, baik yang berkaitan dengan program maupun kegiatan-kegiatannya.
5. Dalam proses klasifikasi dan verifikasi calon penerima Kartu JPS khususnya untuk Kartu Pintar, pendekatan sudut pandang nilai moralitas keagamaan harus dimasukkan, mengingat terbatasnya penerima manfaat tersebut. Sehingga nantinya penerima Kartu Pintar tersebut tidak hanya bisa menempuh pendidikan yang tinggi, akan tetapi juga menjadi generasi yang unggul dalam bidang agama (dalam rangka untuk dakwah *bil-hal* maupun *bil-lisan*).

6. Program jaminan sosial ini harus tetap dilanjutkan dan di kembangkan lagi, mengingat kelompok rentan masih membutuhkan perlindungan dari pemerintah desa agar kesehatan dan pendidikan mereka terjamin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kuaalitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjeman*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2010.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- M. Amien Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muh Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2014.
- Dharmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagyo, *Mandatory: Politik Negara Kesejahteraan di Tanah Republik*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2007.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1993.
- Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

#### **DOKUMEN DAN UNDANG - UNDANG**

- Data monografi Semester I tahun 2015 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul.
- Dokumen Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul “Presentasi Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (BAPEL JPS)”.
- Dokumen Pengantar Laporan Pembangunan Desa Panggungharjo Tahun 2012/2013.
- Keputusan Lurah Desa Panggungharjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.

Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

## **SKRIPSI**

Supardiono, *Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Rachma Suci Arrianti, *Penanggulangan Kemiskinan di Dusun Ceme, Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Rima Fitriani, *meneliti tentang Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sejahtera*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Imam Munajat, *Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Studi Terhadap Konsep, Implementasi, dan Dampak P2KP di Kelurahan Karangwaru Yogyakarta*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Asy'ari, *meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Demangan Gondokusuman, Studi atas pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2005.

## **INTERNET**

Badan Pusat Statistik, “*Jumlah Penduduk Miskin September 2014 Mencapai 27,73 Juta Orang*”, <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1099>”, diakses pada tanggal 03 Oktober 2015.

Badan Pusat Statistik, “*Presentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen*” [Http://Www.Bps.Go.Id/Index.Php/Brs/Index?Katsubjek=23&Brs%5Btg\\_Rilis\\_Ind%5D=&Brs%5btahun%5D=%Yt0=Cari](http://www.bps.go.id/Index.php/Brs/Index?Katsubjek=23&Brs%5Btg_Rilis_Ind%5D=&Brs%5btahun%5D=%Yt0=Cari), diakses Tanggal 01 Oktober 2015.

ICW, “*Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Periode 2014*”, *Hukum Online*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014>. diakses tanggal 03 Oktober 2015.

Peta Batas Wilayah Desa Panggungharjo, <http://bkm.panggungharjo/peta-batas-wilayah>, diakses tanggal 09 Maret 2016.

Sekretariat Kabinet, “*Inilah Peraturan Presiden Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*”, <http://setkab.go.id/inilah-peraturan-presiden-tentang-program-percepatan-penanggulangan-kemiskinan/>, diakses tanggal 03 Oktober 2015.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Jamilludin sebagai Direktur Bapel JPS, Desa Panggungharjo, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016, Pukul 16:11 WIB.

Wawancara dengan Bapak Setyoharjo sebagai Kepala Dukuh Pandes, Desa Panggungharjo, pada hari Sabtu tanggal 5 maret 2016, Pukul 11.35 WIB.

Wawancara dengan Bapak Setyoharjo sebagai Kepala Dukuh Pandes, Desa Panggungharjo, pada hari Sabtu tanggal 5 maret 2016, Pukul 11.35 WIB.



Wawancara dengan Bapak Sunarno sebagai Ketua Seksi Bidang Kemasyarakatan, Desa Panggungharjo, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2016, Pukul 15:01 WIB.

Wawancara dengan Bapak sutrisno, sebagai penerima Kartu JPS Kesehatan Kartu Pintar Desa Panggungharjo, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, Pukul 15:45 WIB.

Wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggoro Hadi sebagai Lurah Desa Panggungharjo pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, Pukul 17:05 WIB.

Wawancara dengan Bapak Warsito, sebagai penerima Kartu JPS Kesehatan Kartu Sehat Desa Panggungharjo, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2016, Pukul 15:45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Iin Herlina, sebagai penerima Kartu JPS Kesehatan, Kartu Ibu dan Anak Desa Panggungharjo, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2016, Pukul 11:34 WIB.

Wawancara dengan Ibu Mariati, sebagai keluarga penerima Kartu JPS Pendidikan Kartu Pintar Desa Panggungharjo, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016, Pukul 14:37 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, sebagai penerima Kartu JPS Kesehatan Kartu Ibu dan Anak, Desa Panggungharjo, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, Pukul 15:45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Suti Ibu dari Bapak Windar, sebagai keluarga penerima manfaat dari program Kartu Pintar Desa Panggungharjo, pada hari Sabtu tanggal 5 maret 2016, Pukul 14:13 WIB.

Wawancara dengan Ibu Suwarningsih, sebagai penerima Kartu JPS Kesehatan Kartu Pintar Desa Panggungharjo, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, Pukul 15:45 WIB.

Wawancara dengan Mas Aji sebagai pengurus Bapel JPS, Desa Panggunharjo, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, Pukul 22:30 WIB.

Wawancara dengan Mas Riki sebagai pengurus Bapel JPS, Desa Panggunharjo, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, Pukul 21:31 WIB.





# LAMPIRAN - LAMPIRAN

## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **A. Pedoman Wawancara dengan Pelaksana Program Bapel JPS (Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial)**

1. Bapel JPS yang ada di Desa Panggungharjo itu seperti apa ?
2. Bagaimana sejarah terbentuknya Bapel JPS (Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial) ?
3. Apa yang melatarbelakangi adanya Bapel JPS di Desa Panggungharjo?
4. Bagaimana tahapan-tahapan proses pembentukan Bapel JPS?
5. Apa hambatan dan kendala yang mempengaruhi pembentukan Bapel JPS ?
6. Apa saja program yang ada dalam Bapel JPS tersebut ?
7. Bagaimana struktur kepengurusan Bapel JPS tersebut ?
8. Kapan JPS di Desa Panggungharjo mulai dilaksanakan ?
9. Bagaimana konsep jaminan sosial melalui inovasi tiga kartu di Desa Panggungharjo ?
10. Apa tujuan JPS (Jaring Pengaman Sosial) tersebut ?
11. Apakah JPS merupakan cara pemerintah Desa Panggungharjo dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakatnya ?
12. Siapa peserta atau penerima layanan JPS ?
13. Apakah ada klasifikasi yang sudah baku dalam penentuan penerima Kartu JPS?

14. Apakah peserta atau penerima manfaat dari program JPS diwajibkan membayar iuran kepada Bapel JPS ?
15. Darimana sumber dana atau anggaran dalam pelaksanaan JPS di Desa Panggunharjo ?
16. Ada berapa program di JPS tersebut ?
17. Apa yang dimaksud dengan JPS kesehatan ?
18. Apa fungsi dan tujuan dari JPS kesehatan tersebut ?
19. Ada berapa macam kegiatan yang ada di JPS kesehatan ?
20. Apa saja layanan yang ada dalam JPS kesehatan ?
21. Apa fungsi dari Kartu Sehat yang ada dalam JPS Kesehatan ?
22. Siapa yang berhak mendapatkan Kartu Sehat tersebut ?
23. Apa saja layanan yang diberikan dalam Kartu Sehat tersebut ?
24. Bagaimana cara menggunakan Kartu Sehat tersebut ?
25. Dimana tempat berobat bagi pemegang Kartu Sehat ?
26. Kartu Sehat ini berlaku berapa tahun ?
27. Apakah pemegang Kartu Sehat dibebaskan dari semua biaya pengobatan ?
28. Siapa yang menanggung semua biaya pengobatan tersebut ?
29. Apakah ada layanan khusus dari pemerintah Desa Panggunharjo bagi lansia terlantar, penderita penyakit kronis dan difabel ?
30. Layanan apa saja yang diberikan kepada lansia terlantar, penderita penyakit kronis dan difabel ?
31. Apakah tujuan dari layanan tersebut ?

32. Apakah lansia terlantar, penderita penyakit kronis dan difabel juga mendapatkan Kartu Sehat dari pemerintah Desa Panggunharjo ?
33. Apakah ada mitra desa dalam pelaksanaan program Kartu Sehat tersebut ?
34. Kendala apa saja yang ada dalam program Kartu Sehat ?
35. JPS melalui Kartu KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) itu seperti apa ?
36. Apa tujuan dari adanya Kartu KIA tersebut ?
37. Siapa yang berhak mendapatkan layanan dari program Kartu KIA ?
38. Apa saja layanan yang diberikan bagi penerima Kartu KIA ?
39. apakah penerima Kartu KIA diwajibkan membayar premi kepada Bapel JPS ?
40. siapa yang menanggung biaya layanan Kartu KIA tersebut ?
41. apakah ada mitra dalam pelaksanaan program KIA ?
42. berlaku sampai kapan Kartu KIA tersebut ?
43. apa yang dimaksud JPS pendidikan dalam program JPS ?
44. apa tujuan dan fungsi dari JPS pendidikan ?
45. ada berapa program dalam JPS pendidikan ?
46. apa yang dimaksud dengan Kartu Pintar dalam program JPS Pendidikan ?
47. apa tujuan dan fungsi dari Kartu Pintar tersebut ?
48. Siapa yang berhak mendapatkan Kartu Pintar ?
49. Apa layanan yang diberikan dalam Kartu Pintar ?
50. Apakah penerima manfaat dari Kartu Pintar ini dibebankan biaya ?

51. Bagaimana penggunaan asuransi pendidikan yang ada dalam layanan Kartu Pintar tersebut ?
52. Sampai jenjang apa layanan asuransi yang diberikan ?
53. Adakah mitra desa dalam program Kartu Pintar tersebut ?
54. Berlaku sampai kapan Kartu Pintar tersebut ?
55. Apakah layanan lainnya yang ada dalam JPS Pendidikan selain program Kartu Pintar ?
56. Apa yang dimaksud dengan layanan anak putus sekolah yang ada diberikan oleh pemerintah Desa Panggunharjo ?
57. Apa tujuan dari layanan anak putus sekolah tersebut ?
58. Apa yang dimaksud dengan layanan penanganan penunggakan SPP ?
59. Apa tujuan dari layanan penanganan penunggakan SPP ?
60. Siapa yang berhak mendapatkan layanan penanganan penunggakan SPP tersebut ?

#### **B. Pedoman Wawancara dengan Penerima Program Bapel JPS**

1. Apa manfaat adanya program JPS bagi anda?
2. Bagaimana perasaanya anda ketika mendapatkan pelayanan JPS dari pemerintah desa ?
3. Apakah dengan adanya program JPS, anda merasa mendapat perlindungan sosial dari pemerintah desa?
4. Apakah kesehatan anda merasa terjamin dengan adanya program Kartu Sehat, dan layanan kesehatan lainnya yang diberikan oleh pemerintah Desa Panggunharjo?

5. Apakah pendidikan anak anda merasa terjamin dengan adanya program Kartu Pintar yang diberikan oleh pemerintah Desa Panggungharjo?
6. Apakah kesehatan kehamilan anda merasa terjamin dengan adanya program Kartu Ibu dan Anak, yang diberikan oleh pemerintah Desa Panggungharjo?
7. Apakah dengan adanya program JPS mengurangi beban pengeluaran anda?
8. Apakah layanan yang diberikan oleh pemerintah Desa Panggungharjo melalui program JPS, semuanya gratis ?
9. Apa dampak yang anda rasakan bagi keluarga anda setelah mendapatkan Kartu Sehat ?
10. Apa harapan anda untuk anak anda setelah mendapatkan Kartu Pintar?
11. Apa dampak yang anda rasakan setelah mendapatkan KIA ?
12. Apa saran, masukan, atau kritikan untuk program JPS yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panggungharjo?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Riyan Agus Prasetyo

Tempat /tgl Lahir : Jepara/ 14 Agustus 1994

Nama Ayah : Suparlan

Nama Ibu : Kasmirah

Alamat Rumah : Desa Kelet RT 37 RW 05, Kecamatan Keling,  
Kabupaten Jepara

Alamat Kost : Gendeng GK V/971D Yogyakarta 55225

Agama : Islam

E-mail : riyanagus268@yahoo.com

No. HP : 0896-0586-8435

Motto : Bersungguh-sungguh dalam setiap hal adalah kunci  
kesuksesan.

## B. Riwayat Pendidikan

### 1. Pendidikan Formal

- a. TK, Tahun Lulus : Al- Falah Kelet Keling Jepara / 1999
- b. MI, Tahun Lulus : Matholi'ul Falah Kelet, Keling, Jepara / 2005
- c. MTS, Tahun Lulus : Perguruan Islam Darul Falah Sirahan, Cluwak, Pati / 2008
- d. MA, Tahun Lulus : Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen, Margoyoso, Pati / 2012

## C. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Masa Periode
1	HMJ PMI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam)	2013 - 2015
2	PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)	2012 - Sekarang
3	LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Rhetor	2013 - 2014
4	KMF (Keluarga Matholi'ul Falah) Yogyakarta	2013 - 2014
5	Mahasiswa Sunan Kalijaga Yogyakarta Jepara	2012 - Sekarang
6	Urban Citizenship Academy (UCA) Solo	2014 - Sekarang